



RESEARCH ARTICLE

**EKSISTENSI *PELA GANDONG* SEBAGAI *CIVIC CULTURE*
DALAM MENJAGA HARMONISASI MASYARAKAT DI MALUKU**

Yakob Godlif Malatuny¹ dan Samuel Patra Ritiauw²

Universitas Padjadjaran

E-mail: ¹godlief_malatuny@student.upi.edu atau ²patra_ritiauw@yahoo.com

Naskah diterima: 17 April 2018, direvisi: 25 Juni 2018, disetujui: 6 November 2018

Abstract

*Current new globalisation cause mindset and more modern Maluku community personalities and individualists, so as though *pela gandong* as cultures that executed it is no longer meaningful. Its negative impact on the next generation of Maluku, most did not know the deeper culture *pela gandong*. Whereas, *pela gandong* is cultural heritage treasure even for the younger generation of Maluku. The legacy of cultural citizenship as *pela gandong* has been evenly distributed across all of the cultural community of Maluku and very urgent because it is not found in the community or other areas in Indonesia. *Pela gandong* as civic culture is a main pillar to keep the harmonization within the community of Maluku, given the potential conflict in the Maluku, as occurred in 1999-2000, then it becomes an obligation for the holder to give all stace full attention to culture *pela gandong*.*

Keywords: *Pela Gandong, Civic Culture, Harmonization*

Abstrak

Derasnya arus globalisasi berdampak pada pola pikir dan kepribadian masyarakat Maluku ke arah yang lebih modern dan individualis, sehingga seolah-olah eksistensi *pela gandong* sebagai *civic culture* yang selama ini dilaksanakan sudah tidak lagi berarti. Padahal, *pela gandong* merupakan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) bahkan titipan warisan bagi generasi muda di Maluku. Eksistensi *pela gandong* sebagai budaya kewarganegaraan ini telah merata di semua budaya masyarakat Maluku dan sangat urgen karena tidak ditemukan pada komunitas atau daerah lain di Indonesia. *Pela gandong* sebagai *civic culture* merupakan pilar utama untuk menciptakan harmonisasi dalam masyarakat Maluku, mengingat potensi konflik di Maluku cukup besar, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1999-2000, maka sudah menjadi kewajiban bagi semua *stace holder* untuk memberikan perhatian penuh terhadap budaya *pela gandong*.

Kata Kunci: *Eksistensi, Pela Gandong, Civic Culture, Harmonisasi.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang puspa-ragam, namun mampu bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan suku, budaya, adat istiadat, agama, ras, gender, strata sosial dan golongan aliansi politik sangat jelas melekat dalam diri masyarakat Indonesia (Zuriah, 2012: 170; Danoebroto, 2012: 95). Kawasan Timur Indonesia menyediakan contoh budaya yang mungkin lebih dapat dipahami sebagai bagian dari sebuah peninggalan masyarakat Austronesia yang lebih tua ketimbang sebuah peninggalan karakter budaya India yang lebih baru (Andaya, 353:1993). Salah satu kebudayaan lokal di Indonesia Timur adalah *Pela Gandong*. Watloly, (2005, 201-203) Budaya *Pela Gandong* merupakan identitas, Ruhlessin (2005) sebagai model perdamaian, Ritiauw (2016) sebagai jati diri, etnis Maluku yang dalam perjalanan sejarah masih tetap dipertahankan dan dilestarikan.

Pela Gandong terjadi dari suatu proses interaksi budaya antara dua atau lebih negeri (desa) yang berbeda latar belakang budaya, dan menghasilkan citra subjektif perilaku masyarakat dari generasi ke generasi (Tutuhatumewa, 2010:2; Ritiauw 2008). *Pela Gandong* adalah sebuah produk budaya yang terjalin kokoh dalam perjalanan sejarah Maluku hingga kini. Produk budaya yang menjadi sejarah tersebut mencerminkan sebuah transmisi.

Geertz (1973:89) menyebutkan bahwa kebudayaan itu merupakan pola dari pengertian-pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam symbol-simbol yang ditransmisikan secara historis. Pendapat Geertz ini tak jauh berbeda dari argumentasi Harrison (2006: 16) yang menyatakan bahwa budaya bukanlah variabel yang berdiri sendiri, namun selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti: geografi, iklim, politik, dan tingkah laku sejarah.

Eksistensi *pela gandong* yang merupakan *civic culture* dan warisan bagi *jujaro-mungare* (baca=muda-mudi) Maluku yang wajib dijaga dan dilestarikan, sehingga bisa menjadi modal atau pijakan dalam pembangunan dan selalu terjalin hubungan yang harmonis. Melihat potensi konflik yang ada, nampaknya memang sangat masuk akal apabila kemudian Maluku hancur

seperti tragedi pada 1999-2000, Sulistiyono (2005: 9; Misbach 2006:4).

Ikatan *Pela Gandong* yang dibanggakan untuk mengikat persaudaraan, terbukti tidak mampu menahan egoisme kelompok, Sulistiyono (2005: 9). Hal ini dapat menyiratkan bahwa bangsa kita belum tahu bagaimana seharusnya memandang perbedaan yang ada, bagaimana menghormati, dan bagaimana mengatasi konflik yang akan timbul, karena tidak pernah ada mekanisme untuk belajar menghadapinya di dunia nyata, Misbach (2006, hlm. 4).

Padahal, *Pela Gandong*, merupakan budaya yang benar-benar mencerminkan pola hubungan yang harmonis yang baik. Oleh karena itu, masyarakat di Maluku perlu menyadari bahwa selain derasnya arus modernisasi, beragamnya komunitas yang berada di Maluku, dan potensi konflik yang ada saat ini, saya merasa rasa *pela gandong* dapat berperan sebagai peredam yang mampu mengurangi gejolak sosial yang bernuansa primordial.

Winataputra dan Budimansyah (2012:233) mengemukakan bahwa "*Civic Culture .. a set of ideas that can be embodied effectively in cultural representation for the purpose of shaping civic identities*" atau seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk membentuk identitas warga negara. *Civic culture* dalam konteks bangsa Indonesia, menggambarkan karakter warga negara Indonesia seperti layaknya yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila (Mahardika dan Darmawan, 2016: 24). Namun, sentimen antar kelompok dapat tereliminasi dengan *civic culture* dan kepentingan ekonomi yang substitusional sehingga konflik sosial dapat diminimalisir melalui *pela gandong* sebagai *civic culture* di Maluku, agar tercipta harmonisasi dalam masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individu maupun

kelompok, (Creswell, 1998). Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna, Biklen, (1982:27-29; Black dan Champion, (1999:286). Konsep tersebut sejalan dengan pendapat Lincoln dan Guba (1985:39), yakni "ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti". Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni: (a) observasi partisipatif, (b) wawancara, dan (c) studi dokumenter. Untuk menguji tingkat kebenaran data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data yang dipergunakan, merujuk dari pemikiran Miles dan Huberman, (1992:18) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Budaya *Pela Gandong*

Secara filosofi, *pela* bukan sekedar berhubungan yang dimaknai sebagai ikatan *geneologis*. Namun lebih dari pada itu merupakan *ikatan sosial* yang melintasi batas-batas kesukuan maupun agama (Islam atau Kristen) dari tiap-tiap desa/negeri yang ber*Pela*. Lokollo (1997:5) mengatakan *Pela-gandong* ialah perserikatan antara satu negeri di pulau-pulau *Ambon-Lease* dengan satu atau beberapa negeri lain di Pulau Seram. Perserikatan didasarkan pada hubungan persaudaraan sekandung sejati, dengan isi dan tata laku perserikatan yang diatur dalam perjanjian baik lisan maupun tulisan, di mana para pihak berjanji untuk tunduk kepada perjanjian dimaksud sebagai dasar hukum bagi implementasinya dari waktu ke waktu.

Pendapat Lokollo (1997:5) diperkuat oleh Watloly, (2005:208), *pela* sesungguhnya mencirikan wacana kontekstual (*local genius*) masyarakat Maluku yang memberi petunjuk tentang misteri kehidupan manusia yang hidup dan berkembang di Maluku yang bersifat

antropomorphis dan sosia religius. Bahkan daya eksis manusia Maluku merupakan bukti autentik bahwa imajinasi adat dan religius yang berkembang mampu memproduksi serta menghadirkan identitas manusia Maluku untuk memahami dan mentransformasi eksistensi sejarahnya yang khas melalui budaya *pela*. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat dan sejarawan asal Maluku Bapak Sem Touwe [April, 2017] menjelaskan bahwa:

"*Pela* adalah hubungan antara satu atau dua atau tiga negeri di Maluku yang terjadi karena ada peristiwa sejarah yang dialami oleh masyarakat negeri itu, atau *pela* itu sumpah dan janji atau ikatan perjanjian antar negeri-negeri. *Pela* terbagi atas tiga yakni *Pela Darah*, *pela* ini terjadi karena adanya peperangan, *Pela Tampa Sirih*, terjadi karena sebuah peristiwa sejarah yang pernah dialami misalnya *pela* antara orang Batu Merah dan Orang Paso, dan *Pela Gandong*, hubungan antara negeri satu dengan negeri yang lain karena ada hubungan geneologi atau pertalian darah".

Pendapat di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pattikayhatu, (2005:2-3) pada dasarnya, ada tiga jenis *pela*, yaitu (1) *pela keras*, (2) *pela gandong* atau *bungsu* (*baca; bongso*) (3) *pela tempat* (*baca; tampa*) *sirih*. *Pela keras* (*baca; karas*) bermula karena adanya peristiwa besar tertentu, biasanya berkaitan dengan perang, seperti pertumpahan darah, pertempuran yang tidak berakhir, atau bantuan luar biasa yang diberikan oleh satu desa kepada desa lain. *Pela Gandong*, didasarkan pada ikatan keturunan keluarga; yaitu, satu atau beberapa suku/marga di desa-desa yang berbeda mengklaim memiliki leluhur yang sama. *Pela tampa sirih* dihasilkan setelah peristiwa kecil, seperti untuk memulihkan kedamaian, setelah ada pertikaian kecil atau setelah satu negeri memberi bantuan kepada negeri lain.

Ruhlessin, (2005:148) dalam disertasinya mengemukakan tiga macam pengertian *pela* yang dipengaruhi oleh lingkungan kebahasaan. Pertama, dalam lingkungan kebahasaan daerah Uli Hatuhaha di Pulau Haruku (Pelauw, Kailolo, Kabaue, Rohomoni dan Hulaliu) kata *pela* berarti "sudah" ini terlihat pada pengalimatan, "*Ale Pamana Pela*" yang artinya apakah

kamu sudah makan. Kedua, lingkungan ke-bahasaannya Uli Solimata di Pulau Ambon (Tulehu, Tengah-tengah, dan Tial), *Pela* berarti “cukup”, contoh penggunaan bahasa terlihat dalam kalimat “*Mahaya Taba Pela*” yang artinya *makanan tidak cukup*. Istilah *Peia* sama dengan istilah “*pela nia*” yang berarti *sampe jua* atau berhentilah.

Ketiga dalam lingkungan bahasa masyarakat di Seram di aksarakan dengan kata “*peia*” yang menunjuk pada pengertian “saudara” yang diambil dari tradisi *kakeban*. Tradisi *kakeban* tidak menunjuk pada hubungan yang berdasarkan faktor genologis melainkan anggota suku. tetapi selain pengertian-pengertian di atas ada juga asumsi bahwa kata “*pela*” berasal dari kata “*Pila*”, yang berarti “*buatlah sesuatu untuk kita bersama-sama*”. Kadang-kadang kata *pila* diberi akhiran “*tu*” menjadi *pilatu*. *Pilatu* berarti *menguatkan, mengamankan atau mengusabakan sesuatu benda tidak mudah rusak atau pecah*. Kemudian itu berubah artinya, yaitu dari sesuatu usaha untuk mengamankan atau menyelamatkan, (Panitia Khusus Panas Pela, 1971:2).

Dalam implementasinya, hakikat *Pela Gandong* dapat terlihat dari lagu-lagu/kapata daerah Maluku yang sering dinyayikan misalnya;

Judul Lagu: Gandong

Gandong, la mari gandong. Mari jua ale o Beta mau bilang ale Katong dua satu gandong Hidup ade deng kaka Sungguh manis lamang e Ale rasa beta rasa Katong dua satu gandong.

Reff.

Gandong e sio gandong e ... Mari beta gendong, beta gendong ale jua, Katong dua cuma satu gandong e Satu bati satu jantong e.

Selain nyayian, hakikat *Pela* juga dapat terlihat dari penggalan “Sumpah *Pela*” yang dilaksanakan pada upacara adat “Panas *Pela*” antara Negeri Hunitetu dan Negeri Lohiatala di pulau Seram.

Sumpa (baca=Sumpah):

“...Mata sakalale pelene kinu kwate kurule, pelekurule; saka mimise, noa mimise, saka nunu rupu kena patu, patu rupu kena nunuee, nunu pale tolase, tolase pali nunuee, bioooo.....!!

Artinya:

Kami sedang minum sumpah abadi, sumpah kekuatan; perhatikanlah, ingatlah; kita harus bersatu sekuat pohon beringan dengan karang terjal, sama seperti karang terjal

ditumbuhi pohon beringin, seperti sebatang pohon (tolase) yang tumbuh bersama pohon beringan, biooo.....!!

Hakikat sumpah adat akan selalu mengikat masyarakat negeri-negeri yang ber*Pela*, serta menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Bakri, (2015:56) menjelaskan salah satu isi “Sumpa Adat” antara Negeri Batu Merah [Agama Islam] dan Negeri Paso [Agama Kristen] yang sampai dengan sekarang ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun berbunyi sumpah adat tersebut yakni:

“Demi Allah yang menguasai jagat raya ini, kami bersumpah mulai saat ini, kami mengangkat orang-orang Batu Merah sebagai pela kakak kandong e dan berlanjut sampai generasi penerus kami dan bila batu karang ini terbalik seperti semula, maka barulah putus hubungan kami”.

Dalam hubungan *pela gandong* tersebut terdapat perjanjian antara dua negeri yaitu:

- a. *Orang Passo dan orang Batu Merah tidak boleh baku kawin.*
- b. *Orang Passo dan orang Batu Merah tidak boleh baku musub.*
- c. *Orang Passo dan Orang Baru Merah harus saling tolong menolong satu sama lain.*

Pentingnya sumpah adat bagi negeri-negeri ber*Pela*, mengisyaratkan bahwa masyarakat mampu membangun kehidupan yang diselaras-kan dengan nilai budaya dan aturan hukum yang berlaku dalam negara. Berdasarkan hasil wawancara bersama akademisi Universitas Pattimura bapak Th. Frans [April, 2017] yang mengaskan bahwa:

Amat penting sumpah adat menurut pandangan masyarakat Maluku karna merupakan suatu proses komunikasi/peristiwa sakral antara anak cucu dengan datuk-datuk yang telah mematri hubungan itu, memiliki kekuatan sakal magis dan mengandung nilai-nilai transedental. Nilai itu diyakini dan tidak pernah goyah dari dulu sampai sekarang.

Sementara hasil wawancara bersama salah satu tokoh agama Kristen, Bapak Riko Rikumahu [Mei, 2017] menjelaskan bahwa:

Sumpah adat itu dilakukan pertama kali saat belum ada agama resmi, karena itu disebut sumpah adat. Sumpah itu dilakukan atas dasar Tuhan, yang dalam perspektif orang Maluku Tengah waktu itu disebut Upu Lanite tidak bisa disebut sekarang seperti Yesus. jadi dalam upacara adat ada nama-nama atau gelar-gelar yang dianggap tinggi dan dinggap setara Tuhan

misalnya Upu Lanite, sebutan kepada Tuhan sebenarnya dan alamat sumpah itu disampaikan, karena itu ia memiliki kekuatan legitimasi religius sama dengan sumpah orang-orang Kristen saat ini, karena memiliki pemaknaan yang sama bahwa bersumpah atas nama Tuhan, masyarakat dilarang untuk melanggar. Jadi semua orang yang terikat di dalam sumpah itu melakukan perjanjian untuk tidak boleh saling melanggar. Peningkaran terhadap sumpah dalam tradisi *pela gandong* memiliki makna peningkaran terhadap janji kepada Tuhan atau Upu Lanite. Dalam perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan relasi antar manusia untuk hidup bersama, juga ditemukan simbol atau tanda bagi orang untuk mengikat suatu perjanjian misalnya darah, siri pinang, sopi. Simbol-simbol ini tidaklah penting, jika tidak ada satu "*akta sumpah*" yang melegitimasi alat-alat itu. Di situ letak pentingnya sumpah adat di dalam negeri-negeri yang membangun relasi *pela*.

Rangkaian sumpah adat dan kapata merupakan simbol sejarah, dalam membangun kesepakatan untuk hidup bersama yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur dan riskan apabila dilanggar karena memiliki nilai ritual dan telah berlangsung turun temurun (Thomas, 2010: 172). Nilai-nilai luhur yang diwariskan lewat adat budaya warga masyarakat diles-tarikan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, terbangunnya hubungan keseimbangan antarumat beragama. Makna dibalik sumpa adat dan kapata atau nyayian daerah Maluku, secara gambalang mengisyaratkan makna persaudaraan sejati (*ale rasa beta rasa*) yang harus tetap terpelihara walaupun badai dan gelombang terus menerpa kehidupan sosial budaya masyarakat Maluku sebagai dampak dari perkembangan globalisasi dunia.

2. *Pela Gandong* Sebagai *Civic Culture*

Pela gandong tidak pernah mengenal kadaluwarsa, tidak lekang juga oleh waktu, karena telah berakar dan tumbuh subur dalam ladang "*hidop orang basudara*" (kehidupan bersaudara). Budaya tersebut merupakan identitas mutlak yang telah melekat dan membara dalam dada ratusan jiwa anak bangsa di Maluku. Identitas pribadi warganegara bersumber dari *civic culture* (Winataputra, 2012: 58), identitas (budaya) sesungguhnya merupakan peninggalan

masa lalu dan warganegara yang mencari identitas tersebut akan menemukan etnisitas (Huntington, 1996: 4, 5). *Civic culture* sebagai sikap dan tindakan yang terlembagakan dan dibangun atas dasar nilai-nilai yang menekankan pentingnya hak partisipasi warganegara untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai aspek kepentingan publik (Budimansyah dan Suryadi, 2008: 186-187). Budaya kewarganegaraan tidak hanya menekankan ingatan dan nilai-nilai bersama, melainkan juga institusi dan praktik-praktik yang sama (Kymlicka, 1995: 114).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S. Maelissa, [Mei, 2017] menjelaskan bahwa:

Sejumlah nilai yang dapat ditemukan dalam budaya "*pela gandong*" diantaranya: masohi (kerja bakti), patita (persamaan status), badati (saling menolong) serta nilai-nilai saling menghormati antara satu agama dengan agama lain. Nilai-nilai ini terimplementasi dalam nilai budaya *pela* yang menjadi perekat hidup orang basudara di Maluku.

Pela gandong yang merupakan *civic culture* terus melekat dalam sanubari orang Maluku dan dipraktikkan sepanjang hidup mereka. Nilai-nilai penting dalam *pela gandong* telah menjadi DNA bagi orang Maluku, sehingga terus memberi perintah bagaimana mereka harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *pela gandong*. Namun, yang tidak kalah penting bahwa *pela gandong* sarat akan nilai-nilai sakral yang bernada pesan damai, sehingga mesti diwariskan dan mengarusuatomakan bagi generasi muda melalui pendidikan di Maluku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sem Touwe [April, 2017] menjelaskan bahwa:

Pada budaya *Pela gandong* tertanam nilai-nilai perdamaian sejati yang harus dapat diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, sekolah harus dapat menjadi lembaga pewarisan nilai-nilai perdamaian dalam bingkai "*hidup orang basudara*" sehingga kelak kita menghasilkan *civic culture* yang lebih berbasis pada nilai-nilai persaudaraan orang Maluku.

Secara konsep *civic culture* terkait erat pada perkembangan *democratic civil societ* atau masyarakat madani yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi, dalam pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang merdeka dan sama tidak lagi terikat oleh atribut-atribut khusus dalam konteks etnis, agama, atau kelas dalam masyarakat (Winataputra, 2012: 57). Masyarakat sivil yang demokratis tidak mungkin berkembang tanpa perangkat budaya yang diperlukan untuk melahirkan warganya, karena itu pula negara harus mempunyai komitmen untuk memperlakukan semua warga negara sebagai individu dan memperlakukan semua individu secara sama.

Secara spesifik *civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaran yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara. *Civic culture* berkenaan dengan proses adaptasi psikososial individu dan ikatan budaya komunitas (keluarga, suku, masyarakat lokal) ke dalam ikatan budaya kewarganegaraan (Winataputra, 2012: 57).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lisy Salamor [Mei, 2017] bahwa:

Pela gandong telah terbukti menopang kehidupan orang Maluku dari waktu ke waktu, ide-ide cemerlang yang telah digagas dan dipraktikkan oleh para leluhur tetap patuhi oleh generasi saat ini.

Apabila berkaca pada beragam konsep *civic culture* dan hasil wawancara di atas, maka di sisi *pela gandong* telah menopang kehidupan warga di Maluku sehingga mampu membentuk identitas warganya, namun di sisi lain telah menjadi harmoni yang menemani dalam setiap perjalanan. Pasalnya, negeri-negeri yang terikat dengan ikatan *pela gandong* wajib tolong-menolong dan saling melindungi dalam budaya rukun yang disebut "*hidop baku bae*" (kehidupan yang saling berkebaikan) (Latif, 2014: 63). Manisnya kehidupan membangun dan menegara telah diwujudkan dalam budaya *pela gandong* sejak dahulu oleh para leluhur hingga kini pada generasi muda di Maluku.

3. Menjaga Harmonisasi Masyarakat Maluku Melalui Pela Gandong

Penduduk Indonesia sangat heterogen dalam etnis, bahasa, adat-istiadat, budaya, dan agama. Kondisi tersebut mendorong dinamika saling berinteraksi, dan kerjasama dalam kehidupan membangun dan menegara. Sebaliknya dengan pilihan kehidupan demokrasi dan reformasi berpotensi terjadi disharmonisasi (konflik) bangsa, apalagi jika masyarakat lemah dalam mengelola harmonisasi dengan baik. Di saat harmonisasi bagaikan barang yang amat langka dijumpai dalam satu dasawarsa terakhir di negara yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, muncul "...Pela Gandong sebagai *civic culture* di Negeri Raja-Raja (Maluku) yang mampu menjadi semen perekat *hidop orang basudara* (kehidupan bersaudara) sehingga memperkuat bangunan ke-Indonesiaan", (Malatuny, 2016:32).

Setiap konflik diikuti dengan resolusi yang berarti upaya menemu-kenali sebab-sebab konflik, menyelesaikan konflik, sekaligus juga upaya agar konflik yang pernah terjadi tidak terulang lagi. Hal tersebut karena konflik terbuka yang terjadi telah merusak harta benda dan menelan korban jiwa yang sia-sia, serta mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Untuk menjembatani disharmoni/konflik tersebut, maka penulis mencoba mengembangkan bangunan *civic culture* yang berfungsi untuk menjaga harmonisasi masyarakat Maluku dari amukan konflik sosial generasi ke tiga di Bumi Penghasil Rempah-rempah. Adapun bangunan itu, terdiri dari:

a. Pemerintah

Menganalisis faktor penyebab konflik oleh Pariela (2008), Ritiauw, (2008), yang menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab konflik sosial tahun 1999 di Maluku yakni tidak meratanya pembangunan. Ketidakterataan pembangunan ini, telah berdampak pada kesenjangan sosial yang semakin menukik dan memberikan ketidak stabilan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka 1). Percepatan pembangunan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang harus diprioritaskan.

2). Penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi pelanggar hukum tanpa tebang pilih juga merupakan solusi untuk menghindari disharmonisasi sebagai bentuk reaksi atas ketidakadilan di depan hukum. 3). Penyediaan lapangan kerja yang memadai oleh pemerintah daerah sebagai bentuk dari pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat di Maluku. 4). Mengimplementasikan visi pemerintah daerah dalam kaitan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai Siwalima [Pela Gandong] sebagai wujud dari *civic culture* masyarakat Maluku melalui pendidikan dan seni, sehingga kelak menghasilkan masyarakat Maluku yang cinta akan persaudaraan melalui slogan “*ale rasa beta rasa*”.

b. Tokoh Agama

Peran tokoh agama dalam menjaga harmonisasi masyarakat Maluku memegang peranan penting. Apalagi akhir-akhir ini “Kebinekaan Yang Tunggal Ika” itu lagi digoncangkan dengan sejumlah hoax dan permainan cantik para aktor politikus yang mempergunakan isu SARA dalam memperoleh kekuasaan dengan menutup mata akan makna keberagaman di Indonesia. Isu ini juga hinggap sampai di Maluku yang pernah luka karena konflik antar agama. Namun, lagi-lagi kesadaran dan kecintaan akan hidup bersama sebagai “orang basudara” telah menepikan sejumlah hoax dalam bingkai “orang basudara”. Penepian isu-isu tersebut, mendapat penanganan serius dari tokoh agama di Maluku.

Gereja, Mesjid, Pura, Wihara, di Maluku harus dijadikan tempat untuk menyuarakan “*civic culture*” sebagai wujud “*hidup orang basudara*”. Tokoh agama harus dapat membangun kerukunan yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan misalnya; 1). Khotbah di Masjid, Gereja, Pura, Wihara dijadikan tempat penyebaran budaya “Pela Gandong” dalam wujud hidup orang basudara, 2). Pertemuan dan diskusi para tokoh agama dan masyarakat, 3). Pelibatan semua anggota masyarakat lintas agama dalam mendukung agenda-agenda keagamaan di Maluku, misalnya pelaksanaan MTQ dan Pesparawi tingkat Propinsi dan Nasional, 4). Membangun silaturahmi antar sesama pemeluk agama melalui perayaan Idul Fitri, Natal, Waisak, Galungan dan Imlek.

c. Tokoh Masyarakat

Menjaga bangunan harmonisasi masyarakat Maluku, juga merupakan salah satu peran mutlak yang sudah seharusnya dilakoni oleh tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dalam kajian ini dipersepsikan sebagai sosok yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membangun masyarakat Maluku ke arah yang lebih baik misalnya tokoh politik. Para tokoh politik sudah sepatutnya dapat mencerahkan masyarakat, menyatukan masyarakat yang mungkin saja telah terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang dimainkan oleh aktor politik itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa langkah yang harus dikembangkan diantaranya; 1). Menjadi corong penyampaian aspirasi masyarakat yang berkeadilan, 2). Membangun basis-basis massa yang mengedepankan prinsip “hidup orang basudara” di Maluku, 3). Membangun diskusi lintas partai politik dalam menumbuhkan kehidupan masyarakat yang baik, 4). Menjadi alat negara untuk menyatukan masyarakat dalam bingkai NKRI.

d. Tokoh Adat

Provinsi Maluku terkenal dengan julukan “Negeri Raja-Raja”. Julukan ini mengisyaratkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Maluku masih sangat tinggi. Kepatuhan pada perintah “raja”, pada aturan adat, serta kepatuhan pada sumpah (baca=sumpa) adat masih

ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, maka peran tokoh adat dalam menjalankan sistem pemerintahan haruslah dapat memberikan kontribusi pikir bagi masyarakat akan pentingnya internalisasi nilai-nilai budaya “pela gandong” yang menyatukan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, budaya, status sosial, status ekonomi dalam masyarakat. Untuk itu, maka bangunan harmonisasi yang dapat dikembangkan tokoh adat di antaranya; 1). Pelaksanaan upacara “Panas Pela” antara negeri-negeri yang berpela dalam kurun waktu tertentu, sebagai wujud internalisasi nilai budaya pela, 2). Pembiasaan budaya “Masohi” [gotong royong], “Pattita”, “Badati” antar negeri-negeri sebagai wujud “hidup orang basudara”, 3). Pertemuan para tokoh-tokoh adat di Maluku untuk mewujudkan Maluku yang terAdat.

e. Peran Media Massa

Media massa telah menjadi budaya *mainstream* (arus utama) dalam melaporkan informasi tentang pelaksanaan pela gandong di Maluku. Informasi yang dilaporkan media massa harus aktual, tajam, terpercaya, dan telah diverifikasi terlebih dahulu agar dapat menjembatani antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat demi mewujudkan bangunan harmonisasi masyarakat di Maluku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rudi Fofid [Maret, 2017] bahwa;

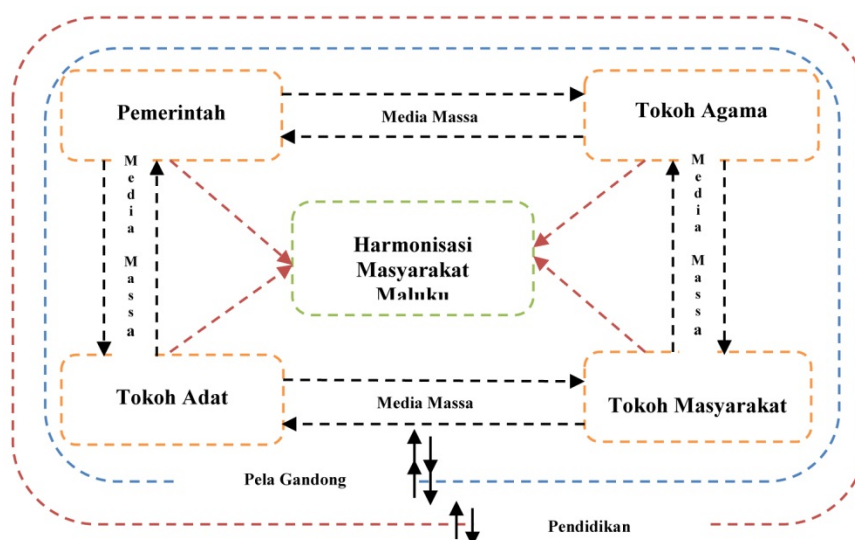
Demi mencegah jebakan kabar bohong maka verifikasi berganda menjadi jurus penyelamat.

Informasi tentang budaya pela gandong yang dilaporkan media harus diverifikasi berulang-ulang, mengingat media massa mempunyai dampak yang sangat kuat pada opini publik (Neumaan, 1973; 1980). Opini yang dibangun di media massa tidak

boleh keliru, sehingga tidak menimbulkan *anomali* dan *chaos* di kalangan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

f. Pendidikan

Pendidikan merupakan jantung pewarisan nilai-nilai budaya dalam masyarakat, karena pendidikan sesungguhnya merupakan proses mengantarkan manusia dari kondisi apa adanya, kepada kondisi bagaimana seharusnya manusia itu hidup dan berkembang sebagai makhluk sosial. Karena itu, sangatlah penting lembaga pendidikan di Maluku menginternalisasikan nilai-nilai budaya pela gandong dalam mewujudkan cita-cita “hidup orang basudara”. Kadir, (2012, hlm. 61) bahwa “Budaya *Sima Lima di Maluku* dalam proses kemunculannya kembali dianggap mempunyai nilai pasifikasi serta rasa persatuan dalam menjaga perdamaian di Ambon pascakonflik”. Selain hal itu pendidikan juga diharapkan berfungsi sebagai alat atau wahana untuk mempercepat perubahan sosial, alat komunikasi publik, serta sebagai alat meminimalisasi berkembangnya konflik. Sebagai alat komunikasi, pendidikan harus dapat membantu pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam mengkomunikasikan nilai-nilai sosial yang merupakan konsensus bersama dalam mewujudkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan memegang kunci utama dalam membangun masyarakat damai yang berbasis pada budaya “pela gandong”.



Gambar 1. Bangunan Harmonisasi Masyarakat Maluku

Sumber. Ritiauw dan Malatuny (2017:78)

Geneva Gay dalam *Culturally Responsive Teaching*, (2000) memberikan sedikitnya lima argumen mengapa muatan budaya dan etnik itu sangat strategis dan penting untuk ditubuhkan dalam kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan damai dan resolusi konflik.

- Muatan budaya dan etnik dalam kurikulum pendidikan sangat krusial sekaligus esensial bagi perbaikan aspek pedagogis guru dalam mengajar.
- Karena kebanyakan sumber belajar di ruang kelas adalah *textbook*, memasukkan agenda budaya dan etnik ke dalam *textbook* merupakan keniscayaan karena hal itu akan mengubah gaya mengajar guru.
- Berdasarkan riset secara simultan di beberapa lembaga pendidikan, muatan budaya dan etnik dalam kurikulum pendidikan memiliki arti yang banyak bagi para siswa sekaligus meningkatkan apresiasi siswa dalam belajar.
- Relevansi muatan budaya dan etnik dalam kurikulum juga menyumbang kelestarian sejarah, budaya, dan tradisi sebuah etnis tertentu sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan apresiasi kebangsaan yang tinggi.
- Muatan budaya dan etnik diambil dari berbagai sumber yang sangat kaya, bukan hanya dari buku tetapi juga dari pengalaman orang perseorangan, baik melalui wawancara maupun yang didokumentasikan dalam bentuk tayangan dan sebagainya. Artinya, sumber informasi yang sangat melimpah tentang budaya dan etnis di luar sekolah itu akan membantu baik guru maupun siswa dalam menciptakan kecintaan terhadap keragaman pola kehidupan.

Dengan demikian, maka pendidikan pada akhirnya berperan sebagai proses membuat orang berbudaya dan beradab. Pendidikan adalah kunci bagi pemecahan masalah-masalah sosial dan melalui pendidikan masyarakat dapat direkonstruksi. Rekonstruksi berarti reformasi budaya, dengan melalui pendidikan reformasi dapat dijalankan, terutama reformasi budi pekerti, reformasi kebudayaan (keindonesiaan), dan reformasi nasionalisme (NKRI).

D. KESIMPULAN

Eksistensi *pela gandong* sebagai salah satu keunggulan budaya bangsa penting diwariskan kepada generasi Maluku sehingga tujuan bangsa dalam mewujudkan *civic culture*/budaya kewarganegaraan dapat direalisasikan dengan baik, dan yang pada gilirannya dapat membantu masyarakat untuk dapat membangun kehidupan yang lebih baik dalam irama "hidup orang basudara". Hidup orang basudara dalam konsep *pela gandong* sesungguhnya mengisyaratkan akan hidup saling cinta, menghargai, menghormati, menjaga tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, status sosial, status ekonomi di dalam masyarakat. Hal ini telah berdampak pada berkembangnya bangunan harmonisasi masyarakat Maluku yang berbasis pada nilai-nilai budaya *pela gandong*. Karena itu, nilai-nilai *pela gandong*/civic culture menjadi mutlak diinternalisasikan melalui pendidikan sebagai lembaga pewarisan nilai-nilai budaya bangsa.

Pewarisan nilai budaya bangsa melalui pendidikan dapat diwujudkan melalui implementasi pembelajaran yang berbasis pada nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Karena itu, penting bagi setiap guru baik guru mata pelajaran matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKn memahami dengan baik nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat dan mengintegrasikannya dalam setiap rigid pembelajaran di kelas.

Ucapan Terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Th. Frans, M.Pd (Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-FKIP Universitas Pattimura).
2. Dr. Sem Touwe, M.Pd (Sejarawan Maluku)
3. Drs. S.H. Maelissa, M.Hum (Tokoh Masyarakat)
4. Dr. Lisye Salamor, M.Pd (Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan –FKIP Universitas Pattimura).
5. Pdt. Rico Rikumahu, S.Th (Tokoh Agama)
6. Rudi Fofid (Sastrawan Maluku)

REFERENSI:

Buku

- Andaya, Leonard Y. (1993). *The Word of Maluku: Eastern Indonesian in Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Banawiratma, JB. (2000). *Berteologi Lintas Ilmu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bartels, Dieter. (1989). *Moluccans in exile: a struggle for ethnic survival, centr for study of social conflict, faculty of social sciences university of leiden, Utrecht*.
- Black, A, James, dan Champion. (1999). *Penelitian Sosial*. Bandung : Rafika Aditama.
- Bogdan, B, C Dan Biklen, S, K. (1982). *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Budimansyah, D dan Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Cooley, Frank. L. (1962). *Ambonese Adat : A General Description*, Yale University, New Haven.
- Creswell, W, John. (1998). *Qualitative Inquiry And Research Desing: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications.
- Geertz, Clifford. (1973). *Interpretation of culture, basic books*, New York.
- Guba, G, E dan Lincoln, S. (1985). *Naturalistic Inquiry*. London: Segal Publications. Bavary.
- Hubert, Th. M. Jacobs, S. J. (1971). *A Treatise On The Moluccas*, Arti Grafiche Citta Di Castello, St. Louis.
- Huntington P. Samuel. (2004). *Benturan Antar-peradaban dan Massa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam.
- Keuning, J. (1973). *Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad Ke-17*. Jakarta: Bhratara.
- Kymlicka, Will. (1995). *Multicultural Citizenship*. New York: Oxford University.
- Latif Yudi. (2014). *Mata Air Keteladanan; Pancasila Dalam Perbuatan*. Jakarta: Mizan.
- Lawrence Harrison. (2006). *Developing Culture*. Routledge: London.
- Leirissa, Richard. (1975). *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Lerissa, R.Z, dkk. (1999). *Sejarah Kebudayaan Maluku*, Depdikbud. Jakarta: Ilham Bangun Karya.
- Lokollo, J.E. at.al. (1997). *Seri Budaya Pela-Gandong dari Pulau Ambon*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Miles, B, Matthew dan Huberman. Michael. A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Noelle-Neumann, E. (1973). Return to the concept of powerful mass media. In G. C. Wilhoit and H. de Bock, eds., *Studies of Broadcasting: An Internasional Annual of Broadcasting Science*. Tokyo: Nippon Hoso Kyokai.
- Noelle-Neumann, E. (1980). *Mass media and social change in developed societies*. In G. C. Wilhoit and H. de Bock, eds., *Mass Communication Review Yearbook*. Beverly Hills, Calif: Sage.

- Noelle-Neumann, E. (1993). *The Spiral of Silence: Public Opinion-Our Social Skin*, 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press.
- Ruhlessin, J. Chr. (2005). *Etika Publik – Menggali dari Tradisi Pela di Maluku*. Salatiga: Satya Wacana University Press – Program Pascasarjana Program Studi Sosiologi Agama UKSW.
- Ruhlessin, John Chr. (2005). *Etika Publik: Menggali dari Tradisi Pela di Maluku*. Salatiga: Satya Wacana University Press.
- Setiadi, Hari dkk, 2007. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Tutuhatumewa, A. Robert. 2010. *Budaya Pela di Maluku: Sebuah Model Komunikasi Antar Budaya dan Implikasinya bagi Pengolahan konflik antar masyarakat, dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial “Badati”*. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UKIM, Ambon.
- Uneputty, T. J. A. (1996). *Perwujudan Pela Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Maluku*. Ambon: Star Offset – Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Maluku.
- Watloly, Aholiab. (2005). *Maluku Baru: Bangkitnya Mesin Eksistensi Anak Negeri*. Yogyakarta: Kanisius.
- Winataputra H. Saripudin. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Winataputra, U. S. dan Budimansyah. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Jurnal**
- Danoebroto, S. Wulandari (2012). “Model Pembelajaran Matematika Berbasis Pendidikan Multikultural”. 1/1, 5-20.
- Frans Thomas. (2010). “Wacana Tradisi Pela Dalam Masyarakat Ambon”. 38/2, 50-60.
- Hatib Abdul Kadir. (2012). “Sapa Bale Batu, Batu Bale Dia: Politik Revivalisme Tradisi Siwa lima Orang “Ambon” Pasca Konflik”. 1 /1, 61-75.
- Hendry Bakri. (2015). “Conflict Resolution toward Local Wisdom Approach of Pela Gandong in Ambon City”. 1/1, 51-59.
- Ibrahim, F. Wajdi. (2012). “Pembentukan Masyarakat Madani Di Indonesia Melalui Civic Education”. 8/1, 130-149.
- Jati, R. Walisongo. (2013). “Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan”. 21/2, 35-45.
- Mahardika, I. W. Trisna dan Darmawan Cecep. (2016). “Civic Culture Dalam Nilai-Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Bali Aga Desa Trunyan”. 23/1, 12-20.
- Nurma Ali Ridwan (2007). “Landasan Keilmuan Kearifan Lokal”. 5/1, 31-40.
- Pattikayhatu, J. A., (2005). Budaya Pela dan Gandong di Maluku Tengah. 1/1, 30-45.
- Suharianta, G. D, dkk. (2014) “Pengaruh Metode Pembelajaran Simulasi Berbasis Budaya Lokal Terhadap Hasil Belajar”. 2/1, 25-35.
- Zuriah, Nurul. (2012). “Kajian Etnopedagogi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Kota Malang Jurnal Humanity”. 8/1, 170-185.
- Tesis/Disertasi**
- Samuel P. Ritiauw. (2008). Peranan Kepemimpinan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Kota Masohi Tahun 1999. Tesis magister pada SPs UPI Bandung: tidak diterbitkan.
- Pariela, Tonny, D. (2008). Damai Ditengah Konflik Maluku. reserved Social Capital sebagai Basis Survival Strategy. Disertasi doktor pada Universitas Kristen Satya Wacana Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Makalah**
- Adi Sulistiyono. (2005). “Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-win solution”. Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret. Tanggal 12 Maret.

Malatuny, Y. Godlif. (2016). "Budaya Maluku". Makalah pada Seminar Nasional Tahun 2016, Bandung.

Misbach, I. (2006). "Peran Permainan Tradisional yang Bermuatan Edukatif dalam Menyumbang Pembentukan Karakter dan Identitas Bangsa". *Laporan Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak diterbitkan.

Samuel P Ritiauw, at all. (2016). "Implementasi Pembelajaran Resolusi Konflik Berbasis Nilai Budaya Pela (Analisis Teori Talcott Parson dalam Pembelajaran IPS)". Prosiding Seminar Nasional Tahun 2016, Jakarta.

Dokumen

Panitia Khusus Panas Pela. (1971). Sama-suru Amalatu [Ameth] Hua Resirehung [Ema], kumpulan dokumen sejarah Pela. Ambon.